**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Pengertian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**
3. **Pengertian Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), yaitu:“…Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Soemarso (2009:14):“…Akuntansi (*accounting)* suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Mursyidi (2010:17):“…Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27) bahwa definisi akuntansi adalah:“…Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan akuntansi adalah pengidentifikasian informasi yang penting untuk pihak yang berkempentingan untuk pembuatan keputusan.

1. **Laporan Keuangan**

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1):“…Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.”

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan suatu susunan daftar atau ringkasan sebagai pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak penilai sebagai yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana prestasi atau hasil kinerja suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan sebagai perbandingan apakah kinerjanya lebih baik atau tidak dengan melihat sisi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1.5-1.6) adalah:“…Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menujukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. “Laporan Laba Rugi

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

1. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

1. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar;
2. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
3. arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

1. **Jenis-Jenis Akuntansi**

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Wibowo dan Abubakar (2008:2) adapun jenis-jenis akuntansi yang telah mengalami perkembangan, antara lain:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial/General Accounting*)

Menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditor.

1. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)

Merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.

1. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.

1. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.

1. Akuntansi Budgeter (*Budgetary Accounting*)

Merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.

1. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Nonprofit Accounting*)

Merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.

1. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat pada perusahaan industri.

1. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Meliputi semua teknik, metode, dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.

1. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Merupakan bidang yang terbaru dalam akuntansi yang paling sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan”.

1. ***Stakeholders***

Freeman dan Reed (1983) dalam Ulum (2009: 4) menyatakan bahwa *stakeholder* adalah“…*any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s objectives, or is affected by the achievement of an organization’s objectives*”.

Freeman et al (2010) menjelaskan bahwa:“…tanggung jawab utama dari eksekutif perusahaan adalah menciptakan nilai sebanyak mungkin untuk *stakeholders.* Ketika ada perbedaan kepentingan antara *stakeholders*, eksekutif perusahaan harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah sehingga kepentingan-kepentingan tersebut dapat berjalan bersamaan dan tercipta nilai yang lebih baik”.

Freeman*et all* (2010)menjelaskan:“…*stakeholder* sebagai grup atau individual yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian dari tujuan organisasi, menimbulkan kebutuhan proses dan teknik dalampeningkatan kemampuan strategi manajemen dalam organisasi”.

.Deegan (2004) dalam Ulum (2009) menjelaskan bahwa:“…seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka, bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi”.

Rees (1995) menjelaskan gagasan dalam Praznikar *et all* (2006)bahwa:“…sesuai teori *stakeholder* perusahaan perlu membangun hubungan jangka panjang dengan para pihak-pihak berkepentingan. Perusahaan diharapkan memiliki keuntungan secara finansial dengan memperkuat hubungan dengan pihak *stakeholder*. Tujuan utama pelaporan akuntansi adalah memberi informasi kepada pihak yang telah menginvestasikan modal dalam bisnis dan karenanya berhak atas kelebihan berikutnya”.

Dari pengertian-pengertian sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan teori *stakeholder* perusahaan membutuhkan hubungan yang baik untuk jangka panjang dengan pihak *stakeholder* baik dengan memiliki kondisi finansial perusahaan yang baik dan menjaga kepentingan dari pihak *stakeholder.*

1. ***Intellectual Capital***
2. **Pengertian *Intelletual Capital***

Istilah *intellectual capital* diperlakukan sebagai *intangible assets.* Meskipun demikian, menyajikan cukup perbedaan dengan meletakkan *intellectual capital* sebagai bahan terpisah dasar penetapan *intangible asset* secara keseluruhan suatu perusahaan. Dengan demikian, terdapat item-item *intangible asset* yang secara logika tidak membentuk bagian dari *intellectual capital* suatu perusahaan (Gustami, 2010:23).

 Pengertian Modal Intelektual menurut Stewart (2010:12):“…*Intellectual capital is the sum of everything everybody in a company knows that gives it a competitive edge. Intellectual capital is intellectual material-knowledge, information, intellectual property, experience-that can be put to use to creat wealth*”.

Selanjutnya Moeheriono (2012:305) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai berikut:“…*intellectual capital* adalah pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial, seperti sebuah organisasi komunitas intelektual, atau praktik profesional serta *intellectual capital* mewakili sumber daya yang bernilai tinggi dan berkemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan”.

Ulum (2009:20) menyatakan bahwa:“…*Intellectual Capital* adalah material yang telah disusun, ditangkap dan digunakan untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi”.

Sedangkan Alipour (2012) dalam jurnalnyamendefinisikan modal intelektual sebagai berikut:“…*intellectual capital (IC)* as *a group of knowledge assets owned or controlled by organisation which significantly impact value creation mechanisms for the organization stakeholder*”.

Definisi modal intelektual menurut Bontis (1998) dalam jurnalnya adalah sebagai berikut:“…*intellectual capital is therefore the pursuit of effective use of knowledge as opposed to information*”.

Bukh *et al.,* (2005) dalam jurnalnya mendefinisikan modal intelektual sebagai berikut:“…*intellectual capital is defined as knowledge resources, in the form of employees, customers, processes or technology, which the company can mobilize in its value creation processes*”.

Roos *et al*. (1997:24) menyatakan bahwa:“…*Intellectual capital will include all the processes and the assets which are not normally shown on the balance sheet,as well as all the intangible assets which modern accounting methods consider (mainly trademarks, patent and brands)”.*

Sedangkan menurut Sangkala (2006:7) yang menyatakan bahwa:“…Pengertian modal intelektual tidak hanya terkait dengan materi intelektual yang terdapat dalam diri karyawan perusahaan seperti pendidikan dan pengalaman. Modal intelektual juga terkait dengan materi atau aset perusahaan yang berbasis pengetahuan, atau hasil dari proses pentransformasian pengetahuan yang dapat berwujud aset intelektual perusahaan”.

Sedangkan Menurut Choudhury (2010) dalam jurnalnya menyatakan bahwa:“…*intellectual capital includes assets such as brands, customer relationships, patents, trademarks and of course knowledge. The growing discrepancy between market value and book value of a corporation is largely attributed to intellectual capital, the intangibles of business that underpin future growth*”.

Purnomosidhi (2006:15) menyatakan bahwa:“…modal intelektual sebagai *intellectual material,* yang meliputi pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman yang dapat digunakan secara bersama untuk menciptakan kekayaan *(wealth)”.*

Koistra dan Zijlstra dalam Purnomosidhi (2006) menyatakan bahwa:“…modal intelektual adalah materi intelektual yang telah diformalisasikan, ditangkap, dan diungkit untuk menciptakan kekayaan, dengan menghasilkan suatu aset yang bernilai tinggi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa *intellectual capital* merupakan suatu aset yang tidak berwujud yang sangat membantu dalam menciptakan kekayaan perusahaan melalui daya pikir yang efektif yang dianggap sebagai suatu unsur dari penciptaan nilai tambah perusahaan.

1. **Komponen *Intellectual Capital***

Moeheriono (2012:305) menyatakan bahwa:“…*intellectual capital* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *human capital* (modal manusia), *structural capital* atau *organizational capital* (modal organisasi), dan *relational capital* atau *costumer capital* (modal pelanggan)”.

Bontis *et al.,* (2000) dalam jurnalnya menyatakan bahwa:“…*Generally, researchers in the field have identified three main constructs of IC that include: human capital, structural capital and customer capital”*.

Sedangkan menurut Choudhury (2010) dalam jurnalnya berpendapat bahwa:“…*Intellectual capital can be defined as the ‘economic value’ of three categories of intangible assets of a company-that includes human capital, organisational capital and social capital collectively*”.

Sedangkan*International Federation of Accountant* atau IFAC (1998)dalam (Ulum, 2009:29) mengklasifikasikan *intellectual capital* dalam tiga kategori, yaitu : *organizational capital*, *relational capital*, dan *human capital*. *Organizational Capital* meliputi a) *intellectual property* dan b) *infrastructure assets*. Tabel 2.1 menyajikan pengklasifikasian tersebut berikut komponen-komponennya

**Tabel 2.1**

**Klasifikasi *Intelectual Capital***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Organizational Capital*** | ***Relational Capital*** | ***Human Capital*** |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Intellectual Property :*** | *Brands* | *Know-how* |  |
| *Patens* | *Customers* | *Education* |  |
| *Copyrights* | *Customers loyalty* | *Vocational* |  |
| *Design rights* | *Backlog orders* | *Qualification* |  |
| *Trade Secret* | *Company names* | *Work-related* |  |
| *Trademarks* | *Distribution* | *Knowledge* |  |
| *Service marks* | *channels* | *Work-related* |  |
| ***Infrastructure Assets :*** | *Bussiness* | *Competencies* |  |
| *Management philosophy* | *collaboration* | *Enterpreneurial* |  |
| *Corporate culture* | *Licensing* | *spirit,* |  |
| *Management Processes* | *agreements* | *innovativeness,* |  |
| *Information systems* | *Favourable* | *Proactive* |  |
| *Networking systems* | *contracts* | *and reactive abilities,* |  |
| *Financial relations* | *Franchising* | *Changebility* |  |
|  | *agreements* | *Psycometric* |  |
|  |  | *Valuation* |  |

1. **Metode Pengukuran *Intellectual Capital***

 Metode pengukuran *Intellectual Capital* dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori (Tan *et al.,*2007), yaitu:

1. Kategori yang tidak menggunakan pengukuran moneter ; dan
2. Kategori yang menggunakan ukuran moneter.

Metode yang kedua tidak hanya termasuk metode yang mencoba mengestimasi nilai uang dari *intellectual capital*, tetapi juga ukuran-ukuran turunan dari nilai uang dengan menggunakan rasio keuangan (Ulum, 2009:49).

Berikut adalah daftar ukuran *intellectual capital* yang berbasis non moneter (Tan *et al.,*2007) :

1. *“The Balance Scorecard*, dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992)

Kinerja perusahaan diukur dengan indikator-indikator yang meliputi empat perspektif, yaitu:

1. *Financialperspective*;
2. *Customerperspective*;
3. *Internal Processperspective*; dan
4. *Learning perspective*.

Indikator-indikator disusun berdasarkan pada tujuan stratejik perusahaan (Ulum, 2009:41).

1. *Brooking’s (1996) Technology Broker method*.

Nilai *intellectual capital* suatu perusahaan ditaksir berdasarkan pada analisis diagnostik dari respon perusahaan terhadap 20 pertanyaan yang meliputi empat komponen utama *intellectual capital*(Ulum, 2009:37).

1. *Skandia IC Report method* dikembangkan oleh Edvinssion and Malone(1997).

*Intellectual capital* diukur melalui analisis 164 ukuran metrik ( 91 berbasis *intellectual* dan 73 tradisional matrik) mencakup lima komponen:

1. Keuangan;
2. Pelanggan;
3. Proses;
4. Pembaruan dan pengembangan; dan
5. Manusia. (Ulum, 2009:40).
6. *The IC-Index* dikembangkan oleh Roos *et al*., (1997).

Mengkonsolidasikan seluruh indikator individual yang merepresentasikan *intellectual property* dan komponen-komponen kepada suatu indeks. Perubahan pada indeks kemudian dihubungkan dengan perubahan di dalam penilaian pasar perusahaan (Ulum, 2009:41).

1. *Intangible Asset Monitor Approach* dikembangkan oleh Sveiby’s (1997).

Manajemen memilih indikator, berdasarkan pada tujuan stratejik perusahaan, untuk mengukur empat aspek dari penciptaan nilai dari aset tidak berwujud. Melalui:

1. Pertumbuhan,
2. Pembaruan,
3. Utilisasi/efisiensi, dan
4. Pengurangan resiko/stabilitas.(Ulum, 2009:41).

Sedangkan model penilaian *intellectual capital* yang berbasis moneter adalah (Tan *et al*., 2007):

1. *“The EVA and MVA* modeldikembangkan oleh Bontis *et al*., (1999).

Dihitung dengan menyesuaikan laba yang diungkap perusahaan dengan beban yang berhubungan dengan *intangible*. Perubahan dalam EVA merupakan indikasi apakah *intellectual capital* perusahaan produktif atau tidak (Ulum, 2009:39).

1. *The Market-to-Book Value* model dikembangkan oleh berbagai penulis.

Nilai *intellectual* diperhitungkan dari perbedaan antara nilai pasar saham (*firm’s stock market value*) dan nilai buku perusahaan (*firm’s book value*) (Ulum, 2009:39).

1. *Tobin’s q method* dikembangkan oleh Luthy (1998).

“q” adalah rasio dari nilai pasar saham perusahaan dibagi dengan biaya pengganti (*replacement costs*) aset. Perubahan pada “q” merupakan proksi untuk pengukurun efektif tidaknya kinerja *intellectual capital* perusahaan (Ulum, 2009:39).

1. *Pulic’s VAICTM Model* (1998, 2000).

Mengukur seberapa dan bagaimana efisiensi *intellectual capital*  dan *capital employed* menciptakan nilai yang berdasar pada hubungan tiga komponen utama, yaitu:

1. *Capital employed;*
2. *Human capital;* dan
3. *Structural capital*. (Ulum, 2009:40).
4. *Calculated Intangible Value* dikembangkan oleh Dzinkowski (2000).

Mengkalkulasi kelebihan *return* pada *hard assets* kemudian menggunakan figur ini sebagai dasar untuk menentukan proporsi dari *return* yang bisa dihubungkan dengan *intangible assets*(Ulum, 2009:40).

1. *The Knowledge Capital Earnings model* dikembangkan oleh Lev dan Feng(2001).

*Knowledge Capital Earnings* dihitung sebagai porsi atas kelebihan *normalized earning* dan tambahan *expected earnings* yang bisa dihubungkan kepada *book assets*(Ulum, 2009:40)”.

VAIC™ adalah teknik langsung yang meningkatkan pemahaman kognitif dan memungkinkan kemudahan perhitungan dengan *stakeholder* internal dan eksternal. Karena beberapa alasan dan kemudahan dari metode VAIC™ yang diciptakan oleh Pulic (1998;1999;2000) banyak peneliti yang menggunakan metode ini dalam mengukur *intellectual capital* yang dimiliki oleh perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*).

**2.1.3.3.1 *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM)**

 Metode *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki perusahaan. (VAICTM) merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi) (Ulum, 2009:86-87).

 Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value Added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*) (Ulum, 2009:87).

 *Value Added* dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output (OUT) mempresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*. Hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak termasuk dalam IN.

 Pulic (1998) menyatakan bahwa:“…*labour expenses were not calculated into input, because of the active role in the value creating process, intellectual potential (represented by labour expenses) cannot be counted as costs any more. This is the key point of my method*”.

Lebih lanjut Pulic (1998) menyatakan bahwa:“…*The result is value added (****VA****) expressing the new created wealth of a period*”.

 *Value Added* dipengaruhi oleh efisiensi dari *Human Capital* (HC) dan *Structural Capital* (SC). Hubungan lainnya dari *value added* adalah *Capital Employed* (CE), yang dalam hal ini dilebeli dengan VACA.

Menurut Pulic (1998) VACA adalah :*“…This is an indicator for the value added created by one unit of physical capital. VACA indicates how efficiently physical capital has been employed*”.

Hubungan selanjutnya adalah *Value Added* dan *Human Capital*. *Value Added Human Capital* (VAHU) menunjukkan berapa banyak *value added* dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara *value added* dan *human capital* mengindikasikan kemampuan dari *human capital* untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Konsisten dengan pandangan para penulis *intellectualcapital* lainnya, Pulic (1998) berargumen bahwa “*that total salary and wage costs are an indicator of a firm’s HC*”.

Hubungan ketiga adalah “*structural capital coefficient*” (STVA), yang menunjukkan kontribusi *structural capital* (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah *structural capital* yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari *value added* dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan *structural capital* dalam penciptaan nilai (Ulum, 2009:88). Tan *et al.,* (2007) dalam jurnalnya menyatakan bahwa:“…*In Pulic’s model, SC is VA minus HC. The lesser the contribution of HC in value creation the greater is the contribution of SC*”.

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual perusahaan dengan menjumlahkan koefisien-koefisien yang telah dihitung sebelumnya. Tan *et al.,*(2007) dalam jurnalnya menyatakan bahwa:“…*The final ratio is the calculation of the intellectual ability of a company. It is the sum of the previously mentioned coefficients. This results in a new and unique indicator – the*VAICTM”.

**2.1.3.3.2 *Modified Value Aded Intellectual Capital* (MVAIC)**

Beberapa peneliti mencoba mengembangkan metode VAIC, di antaranya Kusumawardhani (2012) dan Ulum *et al.,* (2014a). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode VAIC yang telah dimodifikasi yang dikembangkan oleh Ulum *et al.,* (2014a) yang disebut dengan *modified* VAIC (MVAIC).

MVAIC ini muncul berdasarkan penelitian Brinker (1998),Stewart (1997), dan Draper (1998) yang menyatakan bahwa :*“…intellectual capital consists of three components: human capital, structural capital and relational capital”.*

Formulasi dan tahapan perhitungan MVAIC adalah sebagai berikut:

1. ***Value Aded* (VA)**

 M-VAIC adalah ukuran komprehensif *intellectual capital* berdasarkan model VAICTM. Tahap pertama yakni menghitung *Value Added* (VA)*.*

**VA = OP + EC + D + A**

Dimana:

OP = *Operating profit* (laba operasi)

EC = *Employee costs* (beban karyawan)

 = *Salaries and Wages*(Nik Muhammad dan Ismail, 2009)

D = *Depreciation* (penyusutan)

A = *Amortisation* (amortisasi)

1. **Pengertian *Value Aded***

 Menurut T.Gilarso (2004:171): “…value aded adalah selisih antara nilai (harga pasar) dari hasil produksi (outputnya) dengan nilai bahan-bahan (inputnya) yang dibeli dari pihak lain”.

 Definisi *Value Aded* menurut Wurgler (2000) sebagai berikut: “…*Value Added is defined as the value of shipments of goods produced (output) minus the cost of intermediate goods and required services (but not including labor), with appropriate adjustments made for inventories of finished goods, work-in-progress, and raw materials*”.

 Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Collins (1994), definisi *Value Aded*: “…Perbedaan antara nilai dari output suatu perusahaan atau suatu industri, yaitu total pendapatan yang diterima dari penjualan output tersebut, dan biaya masukan dari bahan-bahan mentah, komponen-komponen atau jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi komponen tersebut. *Value Aded* adalah nilai yang ditambahkan oleh suatu perusahaan ke bahan-bahan dan jasa-jasa yang dibelinya melalui produksi dan usaha-usaha pemasarannya”.

 Sedangkan definisi yang lebih detail menurut Ruggles dan Ruggles dalam Staden (2002): “…*Value Added* adalah sebagai nilai tambah perusahaan, seperti penciptaan nilai dari aktivitas perusahaan dan para karyawannya, yang dapat diukur dengan membedakan antara nilai pasar dari barang yang diputar oleh perusahaan dan biaya dari barang dan material yang dibeli dari perusahaan (producer) lainnya”.

 Dari pengertian-pengertian sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *value aded* adalah nilai tambah dari hasil produksi (output) dengan biaya yang dibeli dari orang lain (input).

1. **Pengertian Penyusutan dan Amortisasi**

 Penyusutan adalah proses alokasi harga menjadi alokasi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis 2002:44).

 Menurut IAI (2003:17.1) dalam Hugo Triono (2008:24) adalah: “Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akutansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

 Menurut undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000, pasal 11 dalam Hugo Triono (2008:27) adalah: “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”.

 Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa alokasi biaya yang disisihkan untuk suatu aktiva yang digunakan.

1. **Metode Pengukuran Penyusutan dan Amortisasi**

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2002:44) metode penyusutan dan amortisasi adalah:

1. “Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditetapkan atas aktiva tersebut.
2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*) dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus”.
3. ***Value Added Capital Employed* (VACA)**

 *Value Added Capital Employed* (VACA) menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari *capital employed* terhadap *value added* organisasi (Ulum, 2008). *Value Added Capital Employed* merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa *capital asset* yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Mainkaiw dalam Rifqi(2009) mendefinisikan *Physical capital* sebagai material yang digunakan sebagai input dalam produksi dari barang dan jasa yang akan datang. *Physical capital* (VACA - *Value Added Capital Employed*) dapat dihitung :



(Sumber: Ulum, 2009:89)

Dimana :

*Value Added* (VA) = Selisih antara output dan input.

*Capital Employed (CE) =* Dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

1. ***Value Added Human Capital* (VAHU)**

 *Value Added Human Capital* (VAHU) menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam *human capital* terhadap *value added* organisasi. *Human capital* merepresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. *Human capital* merupakan pengetahuan, *skill,* dan pengalaman yang dibawa pegawai ketika meninggalkan perusahaan yang meliputi pengetahuan individu suatu organisasi yang ada pada pegawainya yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap dan kecerdasan intelektual.

*Human capital* (modal manusia) mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dalam perusahaan tersebut.*Human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pegetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Perusahaan tidak dapat menciptakan pengetahuan dengan sendirinya tanpa inisiatif dari individu yang terlibat dalam proses organisasi. Oleh karena itu *human capital* sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan karena *human capital* merupakan penggabungan sumberdaya-sumberdaya *intangible* yang melekat dalam diri anggota organisasi. *Human capital* merupakan akumulasi nilai-nilai investasi dalam pelatihan karyawan dan kompetensi sumber daya manusia.

*Human capital* menjadi sangat penting karena merupakan aset perusahaan dan sumber inovasi serta pembaharuan. Karyawan dengan *human capital* yang tinggi akan lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang berkualitas sehingga dapat mempertahankan maupun menarik pelanggan baru. Jika informasi mengenai kualitas layanan suatu perusahaan tersedia, tingkat pendidikan dan pengalaman dapat bertindak sebagai indikator kemempuan dan kompetensi perusahaan tersebut, sehingga diharapkan dalam era berikutnya perusahaan lebih mempedulikan *human capital* yang dimiliki. *Human capital* (VAHU - *Value Added Human Capital*) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :



(sumber: Ulum, 2009:89)

Dimana :

*Value Added* (VA) = Selisih antara output dan input.

Human Capital = Nilai investasi dalam HC

1. ***Structural Capital Value Added* (STVA)**

 *Structural Capital Value Added* (STVA) jumlah *structural capital* yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan *structural capital* dalam penciptaan nilai.*Structural capital* (modal organisasi) merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan.

*Structural capital* meliputi seluruh *non-human storehouses of knowledge* dalam organisasi.Termasuk dalam hal ini adalah *database, organizational charts, process manuals, strategies, routines* dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya.(Ulum, 2009).

Menurut Ulum (2009:90), s*tructural capital* dalam suatu perusahaan terdiri atas empat elemen yaitu:

1. *System,* merupakan cara dimana proses organisasi (informasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan) dan output (*product, service,* dan *capital proceed*) dijalankan.
2. *Structure,* merupakan penyusunan taggung jawab dan penghitungan yang mendefinisikan posisi dan hubungan diantara anggota-anggita organisasi.
3. *Strategy,* merupakan tujuan-tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya.
4. *Culture,* merupakan penjumlahan opini-opini individual, pemikiran bersama, nilai-nilai dan norma dalam organisasi.

Perusahaan dengan *structural capital* yang kuat akan memiliki dukungan budaya yang memungkinkan perusahaan untuk mencoba sesuatu, untuk belajar, dan untul mencoba kembali sesuatu. Konsep *intellectual capital* memungkinkan *intellectual capital* untuk diukur dan dikembangkan dalam suatu perusahaan.*Structural capital* (STVA - *Structural Capital Value Added*) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :



(Sumber: Ulum, 2009:90)

Dimana :

*Structural Capital (SC) = VA – HC*

1. **Mekanisme*Good Corporate Governance***
2. **Pengertian *Corporate Governance***

 Menurut Hadi Setia Tunggal (2013:156) dalam Yuli (2017:34) *corporate governance* adalah:”…proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar”.

Menurut *Organization* *for* *Economic* *Cooperation* *and* *Development*

(OECD) dalam Hadi Setia Tunggal (2013: 149) dalam Yuli (2017:35), *corporate governance* adalah:“…*the corporate governance structure specifies the distribution of right andresponsibilities among different participants in the corporation, such us, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.* “sekumpulanhubungan antara pihak manajemen perusahaan dan para stakeholdernya (para pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan). *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur dan perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja”.

*Price Waterhouse Coopers* dalam Surya Yustiavandana (2006:26),mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah: “…terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders”.*

Dari definisi di atas dapat disimpulkan *corporate governance* adalah suatu kebijakan dalam perusahaan yang mengelola, mengatur, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* dan untuk mencapai tujuanperusahaan yaitu mensejahterakan para kepentingan baik itu internal maupuneksternal perushaaan”.

1. **Struktur *Corporate Governance***

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*, berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance* adalah seorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006).

1. **Pengertian *Good Corporate Governance***

 Ardeno Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *Good CorporateGovernance* sebagai berikut : “…*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham *dan stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat.”

 Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* menurut Forum *Corporate Governance* di Indonesian dalam Hery (2010:11) adalah: “…Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

 Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 (2002:pasal 1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:“…Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

 Menurut Sukrisno Agoes (2013:101) , definisi *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:“…Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, Dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga sering disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

 Menurut *The Indonesian Institute for Coroporate Governance* (IICG), *Good Corporate Governance adalah* :“…Struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku”.

 Dari beberapa definisi mengenai *Good Corporate Governance* di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar.

1. **Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

 Surat keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi:

1. “Transparasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

 Moh Wahyudin Zarkasy (2008:38) mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu:

1. “Transparansi (*Transparancy)*

Prinsip dasar, untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang meterial dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Akuntabilitas (*Accountability)*

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

1. Responsibilitas (*Responsibility)*

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate governance.

1. Independensi (*Independency)*

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiantannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kestaraan dan kewajaran”.

1. **Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

 Tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut Agung Adiprasetyo (2004:22) menyatakan bahwa tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. “Mengoptimalkan (untuk menghindari maksimalisasi) pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha. Pemberdayaan sumber daya ekonomis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menggunakan rekstrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antara BUMN atau perusahaan sehingga akan lebih mudah dalam mendapatkan modal dan meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi yang stabil dan berjangka panjang.
2. Memperbesar kemaslahatan secara nasional dari keberadaan sebuah usaha yang dikelola secara baik. Kemaslahatan dari suatu keberadaan usaha menjadi salah satu tujuan penerapan good corporate governance pada perusahaan BUMN yaitu dengan cara meningkatkan kontribusi BUMN pada Negara.
3. Penerapan prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan proaktivitas domestik ketika bersaing dipasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efesiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.”

 Manfaat dari penerapan *good corporate governance* yaitu:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders.*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corparate Value*.
3. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.”
6. **Kriteria *Good Corporate Governance***

 Menurut versi *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OEDC) dalam Hery (2010:6) ada lima kriteria dari *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. *“The rights of shareholders*

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/ laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.

1. *The equitable treatment of shareholders*

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota corporate board dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

1. *The role of stakeholders in corporate governance*

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta finansial.

1. *Disclosure and transparency*

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

1. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.”

1. **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan*Good Corporate Governance***

 Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:36) pelaksanan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen akan berkaitan dengan pihak – pihak yang berkepentingan antara lain:

1. “Pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Hak pemegang sahm harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakan berdasarkan dengan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi dewan komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik dan tanggungjawab.

1. Direksi

Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosialnya memperhatikan kepentingan stakeholder.

1. Eksternal Auditor

Eksternal Auditor harus ditunjukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usul komite. Eksternal auditorbertanggungjawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalahopini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggungjawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggungjawab untuk melihat kewajaran pertanyaan – pertanyaan manajemen dalam laporan audit mereka.

1. Komite audit

Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih dewan komisaris. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantarnya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.

1. Auditor Internal

Didalam perusahaan yang menerapkan good corporate governance, fungsi audit internal antara lain dituntut berperan dalam:

1. Membantu manajemen dalam menilai risiko – risiko utama yang dihadapi perusahaan dan member nasihat kepada manajemen.
2. Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan tanggungjawab kepada komite audit.
3. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.
4. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat perusahaan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan yang beranggungjawab kepada direksi perusahaan.

1. Manajer dan Pekerja

Manajer dan Pekerja bertanggungjawab untuk:

1. Kelangsungan hidup perusahaan
2. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melaluiinovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat digunakan untuk memberi nilai tambahan kepada perusahaan.
3. Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya.
4. Stakeholders lainnya

Stakeholders diberikan kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan menyampaikan kepadaa direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang diperlukan oleh stakeholders untuk melindungi hak mereka. Perusahaan bekerja sama dengan stakeholders demi kepentingan bersama. Pemerintah terlibat dalam good corporate governance melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang member pinjaman mungkin juga memepengaruhi kebijakan perusahaan.”

 Menurut Permen BUMN Nomor : Per – 01/MBU/2011 pelaksanan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen akan berkaitan dengan pihak – pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Eksternal Auditor
4. Komite audit
5. Auditor Internal
6. Manajer dan Pekerja
7. Stakeholders lainnya.
8. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan *Good Corporate Governance***

 Menurut Mas Achmad Daniri (2005:15) ada dua faktor yang memegang peranan terhadap keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance,* yaitu:

1. “Faktor Eksternal

 Faktor Eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah:

1. Terdapat sisitem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasihukum yang konsisten dan efektif.
2. Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat melaksanakan *good corporate governance* dan *clean governance* menuju *good goverment governance* yang sebenarnya.
3. Terdapatnya contoh penerapan *good corporate governance* yang tepat (best practies) yang dapat menjadi standar pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, sejenis benchmark (acuan), terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat.
4. Faktor Internal

 Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan praktik good corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan.faktor internal tersebut diantaranya adalah:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
2. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai – nilai good corporate governance.
3. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah – kaidah standar *good corporate governance.*
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu”.

 Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan Good Corporate Governance pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. “Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikat baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan mengacu pada pedoman perilaku *(code of conduct).*
5. Dukungan dari pihak *Stakeholders.*
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen”.
7. **Mekanisme*Good Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untukmemenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

Menurut Boediono (2005) ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas.

Kunci utama keberhasilan *good corporate governance* adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Menurut Noor Laila (2011), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama berupa *internal mechanism* (mekanisme internal). Kedua, *eksternal mechanism* (mekanisme eksternal). *Internalmechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakanstruktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan *board or director*. Sedangkan *eksternal mecanishm* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain denganmenggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan board or director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah caramempengaruhi perusahaan selain dengan menggunkan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

1. **Saham**
	1. **Pengertian Saham**

Menurut Jogiyanto (2010: 67), saham adalah: “...suatu bentuk penjualan hak kepemilikan perusahaan kepada pihak lain”.

Menurut Samsul (2006: 55), saham adalah: “…tanda bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Bukti suatu pihak disebut sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya DPS disajikan beberapa hari sebelum RUPS diselenggarakan dan setiap DPS dapat melihat DPS tersebut”.

Menurut Fahmi dan Hadi (2011: 68), saham adalah:

1. “Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikut dengan hak dan keajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang diap untuk dijual”.

Menurut Taufik Bintang (2012: 54), saham adalah: “… sebuah sertifikat kepemilikan atas perusahaan dan periode kepemilikan tergantung pemegang saham tersebut apakah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan umumnya kepemilikan saham jangka panjang. Saham merupakan surat berharga, bukti hak kepemilikan investor atau sebuah perusahaan dan senioritasnya lebih rendah dari utang”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah bukti kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan dan merupakan alternatif sumber dana bagi perusahaan penerbit saham.

* 1. **Jenis-Jenis Saham**

Menurut Fahmi dan Hadi (2011: 68), pada umumnya saham dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Saham biasa (*common stock*), adalah: “… suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelasakan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden”.
2. Saham preferen (*preferred stock*), adalah: “… suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebaginya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal(tiga bulanan)”.
3. **Pengertian Struktur Kepemilikan Manajerial**

Christiawan dan Josua (2007) dalam Tjaeleni (2013), menyatakan bahwa: “…kepemilikan manajerial adalah situasi dimana memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham”.

Menurut Wulandari (2011: 26), kepemilikan saham manajerial adalah: “…kepemilikan saham oleh manajemen laba mengurangi *agency* problem diantara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan. Disisi lain, manajer yang memiliki saham perusahaan dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak intensif untuk mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan semua pemegang saham.

 Menurut Jensen dan Meckling dalam Kawastu (2009: 408), kepemilikan manajerial adalah: “…saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenanan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil sertamenanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah”.

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Agustiani (2013), kepemilikan manajerial adalah: “…para manager saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011: 68), kepemilikan manajerial adalah:“…kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer sekaligus sebagai pemegang saham”.

 Menurut Gideon (2005) dalam Indahningrum dan Handayani (2009), pengertian kepemilikan manajerial adalah: “…jumlah kepemlikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manjerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manjemen dari seluruh modal saham yang dikelola.

1. **Pengukuran Struktur Kepemilikan Manajerial**

Menurut Herawaty (2008) dan Darwis (2009) dalam Noor Laila (2011), rasio Struktur Kepemilikan Manajer dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kepemilikan manajerial = $\frac{\sum\_{}^{}saham yang dimiliki manajemen}{\sum\_{}^{}saham yang beredar}x100$%

1. **Pengertian Struktur Kepemilikan Institusional**

Menurut Jensen dan Meckling dalam Kawastu (2009: 408), kepemilikan institusional adalah: “…saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memproduksi laba masa depan dibanding investor *noninstitusional*. Investor institusional diyakini mampu memonitor tindakan manajerdengan lebih baik dibanding dengan investor individual”.

Menurut Nuraina (2012: 116), kepemilikan institusional adalah: “…persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga(perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lainnya)”.

Menurut Bodieono (2005), kepemilikan institusional adalah: “…pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider.* Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manjemen perusahaan sehari-hari”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dari seluruh jumlah modal saham perusahaan yang dikelola.

1. **Pengukuran Struktur Kepemilikan Institusional**

 Pengukuran Kepemilikan Saham Institusional yang dikemukakan oleh Fury K Fitriyah dan Dina Hidayat (2011: 35), yaitu:

INST=$\frac{Jumlah saham yang dimiliki institusi}{Jumlah saham yang beredar}$ x100%

1. **Pengertian Komisaris Independen**

Menurut Widjaja (2009: 79), dewan komisaris independen adalah: ”…anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Menurut Fakhruddin (2008: 102), dewan komisaris adalah: ”…anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Menurut Nuryaman (2008: 5), komposisi dewan komisaris adalah: “…susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan nasihat kepada manajemen. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan suatu perusahaan, tidak memiliki jabatan rangkap diperusahaan lain yang terafiliasi dengan suatu perusahaan dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 tentang direksi dan dewan komisaris emiten pada perusahaan publik “…Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris”.

1. **Pengukuran Komisaris Independen**

Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015), yaitu proporsi komisaris independen :

$$Komisaris Independen=\frac{Jumlah Dewan Komisaris Independen}{Jumlah dewan komisaris}x100\%$$

1. **Pengertian Komite Audit**

Menurut James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007: 16), komite audit adalah: “…pemeriksa dan penyeimbang yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal”.

Menurut Komite Nasional kebijakan *Governance* (2006), dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, komite audit adalah: “…sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau jumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 seperti yang dikutip oleh Nasution dan setiawan (2007:7-8), komite audit adalah: “…komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi auditor eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpukan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit.

Bapepam menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/PM/2000 yang menghimbau agar emiten dan perusahaan public mempunyai Komite Audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris, sedangkat anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua.

1. **Pengukuran Komite Audit**

Indikator yang digunakan untuk mengukur Komite audit yang dikemukakan oleh perdana (2014), yaitu:

$$Komite Audit=\sum\_{}^{}Anggota Komite Audit di Perusahaan$$

1. **Profitabilitas**
2. **Pengertian Rasio Profitabilitas**

 Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau profitabilitas yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Menajemen perusahaan dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah di tetapkan. Besarnya keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal mendapatkan keuntungan.

Menurut Sutrisno (2009:222) “Rasio adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan.”

 Menurut R. Agsus Sartono (2010: 122) profitabilitas adalah: ”…kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri”.

 Menurut Murhadi, Werner R.(2013:114) rasio profitabilitas merupakan:

 Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.rasio profitabilitas ini dibagi dua yaitu sebagai berikut :

1. Rentabilitas ekonomi adalah dengan membandingkan laba usaha dengan seluruh modal (modal sendiri dan asing)
2. Rentabilitas usaha adalah (sendiri) adalah dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar.

 Menurut Harahap (2011: 304) rasio profitabilitas adalah: ”…rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”.

 Sedangkan menurut Kasmir (2012: 196) rasio profitabilitas adalah:”…rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.

 Rachmawati (2012) menyatakan bahwa*“Return On Asset* (ROA) adalahpengukur kemampuan perusahaanmenghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan.

 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dari seluruh kegiatan penjualan, total aktiva dan sebagainya.

1. **Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013: 197) adalah:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan digunakan baik modal sendiri”.

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013: 198), yaitu:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.
6. **Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

 Menurut Kasmir(2008:199) dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

1. Profit margin (profit margin on sales)
2. Return on investment (ROI)
3. Return on equity (ROE)
4. Laba per lembar saham
	* + 1. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2008:89), faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) antara lain, adalah :

* 1. Margin laba bersih
	2. Perputaran total aktiva
	3. Laba bersih
	4. Penjualan
	5. Total aktiva
	6. Aktiva tetap
	7. Aktiva lancar
	8. Total biaya

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas menurut BambangRiyanto (2010:37), yaitu:

1. Profit Margin

 Yaitu perbandingan antara *net operating income* atau laba bersih usaha dibandingkan dengan net sales atau penjualan bersih dan dinyatakan dalam prosentase (%) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (Laba Usaha / Penjualan Bersih) x 100%

1. *Turn of Operating Asset*

 Yaitu dengan jalan membandingkan antara net sales atau penjualan bersih dengan operating asset atau modal usaha yang di rumuskan dengan: Penjualan bersih / Modal usaha.

Muhammad Fardin Faza dan Erna Hidayah (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan adalah :

* 1. *Employee stock option plan*
	2. *Intellectual Capital*
	3. Ukuran perusahaan
	4. Tingkat risiko
	5. Tingkat penegmbalian ekuitas
	6. Jenis industry
		+ 1. **Metode Pengukuran Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2008:199) :

1. Profit margin on sales

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

 Terdapat dua rumus untuk mencari *profit margin,* yaitu sebagai berikut :

Profit margin = $\frac{penjualanbersih-hargapokokpenjualan}{sales}$

(profit margin on sales)

1. Hasil Pengembalian Investasi (return on investmen/ROI)

 Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama*return on investment* (ROI) atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

 Rumus untuk mencari *return on investment* dapat digunakan sebagai berikut :

Return on investment (ROI) = $\frac{earningafterinterestandtax}{totalassets}$

1. Hasil pengembalian investasi (ROI) dengan pendekatan *du point*

 Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan du point. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan du point adalah sama.

 Berikut ini adalah cara mencari hasil pengembangan investasi dengan pendekatan du point :

ROI = margin laba x perputaran total aktiva

1. Hasil pengembalian ekuitas (return on equity/ROE)

 Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atas rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri.Semakin tinggi rasio ini, semakin baik.Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

 Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut :

Return on equity (ROE) = $\frac{earningafterinterestandtax}{equity}$

1. Hasil pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) dengan pendekatan *du point*

 Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan du point. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan du point adalah sama.

Berikut ini cara mencari hasil pengembalian investasi dengan pendekatan du point:

ROE = margin laba bersih x perputaran total aktiva x pengganda ekuitas

1. Laba per lembar saham biasa (earning per share of common stock)

 Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen untuk mencapai keuntungan bagi pemegang saham.Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain tingkat pengembalian yang tinggi.

 Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, deviden,dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

 Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut :

Laba per lembar saham = $\frac{labasahambiasa}{sahambiasayangberedar}$

 Menurut Agus Sartono (2010: 123) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas, di antaranya:

1. “*Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baaik *gross profit margin,* maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. *Gross profit margin* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Profit Margin=\frac{Net Sales-Cost of Goods sold}{Sales}$$

1. *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. *Net profit margin*  dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Net Profit Margin=\frac{Earning After Tax (EAT)}{Sales}$$

1. *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Return on Equity \left(ROE\right)=\frac{Earning After Tax (EAT)}{Shareholder^{'}s Equity}$$

1. *Return on Assets* (ROA)

Rasio ini disebut juga dengan rasio *return on investmen* (ROI). Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perushaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Return on Assets \left(ROA\right)=\frac{EAT}{Total Assets}$$

1. **Definisi Laba**

 Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Menurut Harahap (2011: 113) laba adalah: ”…kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”.

 Menurut Suwardjono (2008: 464) laba dimaknai: ”…sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa)”.

 Sedangkan menurut M. Nafarin (2007: 778) laba adalah: ”… perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu”.

 Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan laba merupakan imbalan atas kelebihan perusahaan menghasilkan barang dan jasa diatas biaya selama satu periode akuntansi.

1. **Jenis-Jenis Laba**

 Menurut Subramanyan dan Wild (2010: 26) laba terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. “Laba kotor yang disebut juga margin kotor (*gross margin*) merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan.
2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.
3. Laba sebelum pajak merupakan laba operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
5. Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bungga dan pajak”.
6. **Definisi Aktiva**

 Setiap perusahaan memiliki aktiva yang berbeda-beda dalam hal jumlah dan jenis aktiva yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pada perbedaan jenis operasi atau usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

 Aset adalah sumber daya perusahaan. Secara umum aset adalah bentuk alokasi dana atau disebut juga dengan investasi. Dengan demikian selama suatu aset masih terdaftar di dalam neraca berarti aset tersebut masih digunakan oleh perusahaan Toto Prihadi (2010:231).

 Menurut Slamet dan Riyono (2008: 84) aktiva adalah: ”…manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

Sedangkan menurut S. Munawir (2010: 30) aktiva adalah: ”…sarana atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif”.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan aktiva merupakan sarana yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapatkan keuntungan di masa depan yang masih tercatat di dalam neraca.

1. **Tujuan Pelaporan Laba**

 Menurut Harahap (2011: 300) ada beberapa tujuan pelaporan laba adalah sebagai berikut :

1. “Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara.
2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dana yang akan ditahan dalam perusahaan.
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang.
5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi”.
6. **Jenis-Jenis Aktiva**

 Menurut Danang Sunyoto (2013: 124) aktiva terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. “Aset Lancar

Merupakan aset yang meliputi kas dan sumber daya ekonomik lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun, antara lain: kas, piutang, perlengkapan, persediaan dan lain-lain.

1. Investasi Jangka Panjang

Penanaman diluar perusahaan dalam jangka panjang dengan maksud untuk menguasai perusahaan lain, atau memperoleh pendapatan tetap atau memperoleh kenaikan nilai.

1. Aktiva Tetap

Merupakan sumber-sumber ekonomik yang berwujud yang perolehannya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dahulu. Aset tetap terdiri dari mesin, gedung, kendaraan dan peralatan kantor.

1. Aktiva Takberwujud

Merupakan hak-hak istimewa atau kondisi yang menguntungkan perusahaan dalam mencapai pendapatan. Hak paten *goodwill* merupakan bagian dari aktiva takberwujud.

1. Aktiva Lain-lain

Merupakan aset-aset yang tak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset takberwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah gedung yang masih dalam proses pengembangan dan aset pajak tangguhan”.

1. **Karakteristik Aktiva**

 Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki untuk digunakan produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administrative, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Slamet Sugiri (2009:134) Selain itu aktiva memiliki tiga sifat pokok yaitu:

1. “Mempunyai kemungkinan manfaat di masa datang yang berbentuk kemampuan untuk menyabung aliran kas masuk.
2. Suatu badan usaha tertentu dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut.
3. Transaksi-transaksi yang menjadi timbulnya hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi anfaat tersebut sudah terjadi”.
4. **Kerangka Pemikiran**
5. **Pengaruh *Structural Capital* terhadap Profitabilitas**

*Intellectual capital* tidak memilikidefinisi secara pasti. Beberapa peneliti mengartikan secara berbeda karena konsep mengenai IC sangat luas dan sering terbagi menjadi beberapa kategori. *Organizationfor Economic Co-Operation and Development* (OECD) dalam (Adeline,2012)mendeskripsikan*intellectualcapital* sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aktiva tidakberwujud perusahaan, yaitu *organizational (structural) capital* dan *human capital*.(Soetedjo & Mursida,2014)menambahkan Pemahaman atas komponen-komponen yang mambentuk modal intelektual menjadi sangat penting mengingat komponen tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi dasar bagiperusahaan dalam menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan nilai tambah dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya intelektual dengan baik, dan atas dasar keunggulan kompetitif dan nilai tambah tersebut perusahaan mendapatkan penghargaan lebih dari investor dengan berinvestasi lebih tinggi pada perusahaan. Semakin tinggi *intellectual capital* maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan, sehingga keunggulan kompetitif dan nilai tambah yang didapat dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Ditambah menurut PT Bursa Efek Indonesia (2015) dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. Perolehan dana dapat melalui penjualan saham kepada publik, mempermudah akses perbankan, dan mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan akan memperoleh banyak keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *intellectualcapital* berpengaruh terhadap kinerjakeuangan.

1. **Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Profitabilitas**

Manajer sebagai pengelola perusahaanlebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajibanmemberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

MenurutUjiyantho dalam Jaya Laksana (2015) kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q adalah linear dan negatif atau dengan kata lain semakin tinggi kepemilikan manajerial maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin menurun. Hal ini menurut wardhani (2006)adanya management entrenchment, yang menyatakan kepemilikan Insideryang tinggi akan berdampak pada kecenderungan manajer untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, dikarenakan hak votingdan bargaining poweryang semakin tinggi yang dimiliki oleh insiderdalam penentuan kebijakan sehingga mengakibatkan pemilik tidak mampu menjalankan mekanisme controldengan baik, hal ini akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan karena tidak terjadi ketidaksamaan kepentingan antara manajer dan pemilik yaitu pemegang saham minoritassecara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga kemungkinan kinerja keuangan perusahaan akan cenderung mengalami penurunan.

1. **Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas**

Struktur kepemilikan perusahaan dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi mekansime corporate governance suatu perusahaan (Berthelot et al.,2010). Ditambah menurut Faiza Nur Rohmah (2013) dalam Astri Aprianingsih (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang merupakan kondisi dimana pihak institusi memiliki saham di suatu perusahaan dan biasanya dalam jumlah yang besar. Kepemilikan institusional memang memiliki jumlah kepemilikan saham yang sangat tinggi sehingga institusi akan cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang nantinya malah lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas yaitu pihak institusi. Dengan keadaan yang tidak kondusif tersebut maka tidak akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

1. **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Profitabilitas**

Komisaris independen memiliki tugas yang sama seperti dewan komisaris, dan memiliki perbedaan dalam tugas penyelarasan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam perusahaan. Selain itu, perbedaan komisaris independen dengan dewan komisaris adalah komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan.Dengan kebenaran dan kelayakan informasi keuangan dan informasi perusahaan lainnya maka dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.Komisaris independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan mereka, keahlian pengetahuan dan objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham Pandya(2011).Akan tetapi, menurut Ahmad Santoso (2015) dalam Astri Aprianingsih (2016) menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen yang cenderung hanya untuk mewujudkan *good corporate governance* dan kurangnya kesadaran melakukan pengawasan.Ini berarti dewan komisaris independen belum dapat berfungsi dengan baik untuk alat memonitor manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

1. **Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas**

Pohan dalam Ayu(2011) memaparkan bahwa dewan komisaris wajibmembentuk dewan audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga oranganggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewankomisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung bertindak efisien,namun juga memiliki kelemahan, yaitu minimnya ragam pengalaman anggota,sehingga anggota audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentangpembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasiterpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan danpandangan independen.Dengan adanya komite audit makaakan memiliki konsekuensi berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan illegal pada laporan keuangan.

Effendi(2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerjaperusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Pengendalian perilaku eksekutif meningkat

Keseimbangan kebijakan perusahaan meningkat

Meningkatnya kesadaran melakukan pengawasan

Monitoring manajemen meningkat

Pengukuran, pengungkapan, dan kecurangan akuntansi yang tidak tepat pada laporan keuangan menurun

komisaris independen berkurang

Struktur kepemilikan Institusional menurun

Komite Audit semakin banyak

Struktur Kepemilikan manajerial menurun

Investasi investor semakin banyak

Kendala pendanaan perusahaan berkurang

Intelektual Capital semakin tinggi

Nilai tambah perusahaan semakin tinggi

Meningkatnya daya saing perusahaan

Kepentingan saham minoritas lebih terakomodir

Hak voting dan bergaining power insider menurun

Mekanisme control dari pemilik/ pemegang saham mayoritas meningkat

Kinerja Keuangan Meningkat

1. **Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2014:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Intellectual Capital* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

Hipotesis 2: Struktur Kepemilikan Manajerialberpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

Hipotesis 3: Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

Hipotesis 4: Komisaris Independen berpengaruh signifikanterhadap Profitabilitas

Hipotesis 5: Komite Audit berpengaruh signifikanterhadap Profitabilitas